

# **MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK**

**Tahun XIV, Nomor 4, Oktober 2001**

**ISSN 0216-2407**

**Konflik Dayak-Madura di Kalimantan Tengah:  
Melacak Akar Masalah dan Tawaran Solusi**  
Ruslikan

**Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan  
di Jawa Timur**  
Septi Ariadi

**Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin**  
Bagong Suyanto

**Pangan, Penduduk dan Teknologi Pertanian:  
Sebuah Perdebatan Teoritis**  
Doddy S. Singgih

**Menakar Peran BUMN di Era Otonomi**  
Koko Srimulyo

**Analisis Politik Ekonomi Petani  
Dalam Struktur Hubungan antara  
Negara dan Pasar**  
Mustain Mashud

**Kekuasaan dan Kekerasan**  
Thomas Santoso

**MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN POLITIK** diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga sebagai terbitan berkala empat bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum yang efektif bagi komunikasi belajar mengajar.

**Pemimpin Umum**  
Sri Sanituti Hariadi

**Penanggungjawab**  
I Basis Susilo

**Dewan Redaksi**  
Soetandyo Wignjosoebroto  
A Ramlan Surbakti  
Hotman M Siahaan  
Dede Oetomo

**Pemimpin Redaksi**  
Wahyudi Purnomo

**Sekretaris Redaksi**  
Hariono

**Redaksi Pelaksana**  
Priyatmoko  
T Sumarnugroho  
Sutinah  
Yusuf Emawan

**Produksi dan Marketing**  
Wisnu Pramutanto  
Suyono

STT No 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981  
ISSN 0216-2407

**Alamat Redaksi**  
FISIP Unair  
Jl Airlangga 4-6  
Surabaya 60286,  
Indonesia  
Tilpon 031-5034015  
Fax 031-5022492  
e-mail: [mkp@sbv.centrin.net.id](mailto:mkp@sbv.centrin.net.id)

#### Ketentuan Minimal untuk Penulis

1. Tulisan orisinal dan belum pernah di media penerbitan lain.
2. Tulisan spasi rangkap pada kertas kuwarto yang diketik dengan Microsoft Word (MS) atau Word Star (WS).
3. Menyerahkan *printout* dan *copy* disketnya
4. Judul dibuat jelas, ringkas dan padat.
5. Isi tulisan mempunyai relevansi kuat dengan kebutuhan belajar-mengajar di lingkungan ilmu-ilmu sosial.
6. Isi tulisan berkaitan erat atau disesuaikan dengan bidang keilmuan yang selama ini dikuasai penulis.
7. Memperhatikan objektivitas substansi dan kaidah-kaidah umum keilmiah.
8. Pertanggungjawaban isi ada pada penulis.
9. Penulis mengirimkan riwayat hidupnya.
10. Menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris secara benar dan baik dengan alur dan struktur kalimat yang jelas dan benar.
11. Kutipan ditulis secara *running notes*. Kutipan dan kepastakaan disusun menurut contoh berikut.

Kutipan:

..... (Kennedy, 1993:145-9).

Daftar Kepustakaan:

Kennedy, Paul, *Preparing for the Twenty-First Century* (London: Harper Collin Publisher, 1993).

McEachern, Dough, "Clash Analysis," in Andrew Parkin et al., (eds.), *Government, Politics, Power and Policy in Australia*, 5<sup>th</sup> ed. (Melbourne: Longman Cheshire, 1994).

12. Redaksi mengembalikan tulisan kepada penulis bila tulisannya dipandang belum layak muat dan memerlukan revisi.
13. Redaksi berwenang mengedit sebuah tulisan tanpa merubah isi dan pokok pikiran penulisnya.

## PENGANTAR REDAKSI

Edisi Tahun XIV, Nomor 4, Oktober 2001 berisi tujuh. Tujuh artikel tersebut membahas bidang kajian antropologi, sosiologi, politik, dan administrasi negara. Tulisan mengenai kajian antropologi ditulis oleh Ruslikan. Persoalan sosiologi oleh Septi Ariadi, Bagong Suyanto, dan Doddy S Singgih. Persoalan politik ditulis oleh Mustain Mashud dan Thomas Santoso. Sedangkan persoalan administrasi ditulis oleh Koko Srimulyo.

Seperti edisi-edisi sebelumnya, dalam edisi ini kami menyertakan asal perguruan tinggi dan latarbelakang pendidikan para penulis di bawah nama penulis, agar sidang pembaca dapat mengetahui secara segera siapa penulis makalah yang sedang atau akan dibaca. Kami menyadari bahwa informasi mengenai latar belakang penulis tidak dituliskan selengkap sebelumnya.

Dalam edisi ini, kami berupaya tetap mempertahankan keberadaan "Indeks Penulis dan Tulisan *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* sejak Edisi 1999". Kami berharap sidang pembaca dapat mengetahui tulisan-tulisan apa saja yang sudah pernah dimuat di jurnal ini. Apabila diantara sidang pembaca memerlukan hasil-hasil tulisan yang pernah dimuat sebelum edisi ini, dapat menghubungi kami di alamat, tilpon atau e-mail seperti yang telah tertera dalam rubrik ini.

Sekali lagi kami mohon maaf bila masih terdapat beberapa kelemahan teknis seperti pemotongan kata yang terkesan dipaksakan untuk mengejar kerapian kolom. Di samping itu, ketika kami banyak mendapatkan kiriman artikel, sebenarnya kami ingin sekali dapat memuat seluruhnya, akan tetapi kami terpaksa menyeleksi sesuai syarat yang ada dan keterbatasan ruang dalam jurnal ini.

Sampai saat ini kami selalu mengharapkan masukan dari pembaca mengenai tulisan-tulisan yang telah dimuat dalam edisi ini. Masukan-masukan dapat berupa artikel ilmiah, kritik atau tanggapan ilmiah berupa artikel terhadap hasil pemikiran-pemikiran yang telah diajukan oleh penulis-penulis sebelumnya, dan resensi buku. Seperti edisi ini dan edisi-edisi sebelumnya, jurnal ini menerima juga tulisan-tulisan berbahasa Inggris.

Kami selalu berharap, jurnal *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini bisa menjadi salah satu media bagi para ilmuwan ilmu-ilmu sosial dalam rangka menciptakan suatu komunitas belajar yang kreatif dan produktif (*a productive and creative learning community*) di tengah-tengah masyarakat luas.

## DAFTAR ISI

<b>Pengantar Redaksi</b>	iii
<b>Daftar Isi</b>	iv
<b>Konflik Dayak-Madura di Kalimantan Tengah: Melacak Akar Masalah dan Tawaran Solusi</b> Ruslikan	1
<b>Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan di Jawa Timur</b> Septi Ariadi	13
<b>Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin</b> Bagong Suyanto	25
<b>Pangan, Penduduk dan Teknologi Pertanian: Sebuah Perdebatan Teoritis</b> Doddy S. Singgih	43
<b>Menakar Peran BUMN di Era Otonomi</b> Koko Srimulyo	55
<b>Analisis Politik Ekonomi Petani dalam Struktur Hubungan Antara Negara dan Pasar</b> Mustain Mashud	77
<b>Kekuasaan dan Kekerasan</b> Thomas Santoso	89
<b>Indeks Penulis dan Tulisan</b>	v

## KEKUASAAN DAN KEKERASAN

Thomas Santoso

Dosen Universitas Kristen Petra Surabaya,  
lulusan Unair (S1, S2 dan S3)

### Abstract

When states own power in a dominant position, do they tend to use violence? Is violence an instrument used by states to defend their power. To what extent the political system chosen by a state shapes the use of violence? This paper is aimed to answer such questions. Compared to coercive communist, democratic-socialist, and traditional autocratic political systems, democratic political system has more persuasive power sources. But is there a guarantee that the democratic political system is sterile from the possibility of using violence by state?

Keywords: power, state, political system, violence.

### Kekuasaan

Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kesempatan yang ada pada seseorang atau sejumlah orang untuk melaksanakan kemauannya sendiri dalam suatu tindakan sosial, meskipun mendapat tantangan dari orang lain yang terlibat dalam tindakan itu (Poloma, 1979: 52). Kesempatan (*chance* atau *probability*) merupakan satu konsep yang sangat inti dalam definisi Weber. Dalam definisi di muka, kesempatan dapat dihubungkan dengan ekonomi, kehormatan, partai politik atau dengan apa saja yang merupakan sumber kekuasaan bagi seseorang. Kesempatan seorang pejabat untuk melaksanakan kemauannya tentu lebih besar dibanding kesempatan seorang petani.

Kekuasaan tidak selamanya berjalan lancar, karena dalam

masyarakat pasti ada orang yang tidak setuju atau melakukan perlawanan, baik secara terbuka atau terselubung, terhadap kekuasaan (Scott, 1990: xii-xiii). Bahkan menurut Amitai Etzioni, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi sebagian atau semua perlawanan, untuk mengadakan perubahan-perubahan pada pihak yang memberikan oposisi (Poloma, 1979).

Dari dua definisi di atas kita bisa melihat adanya perbedaan pandangan antara Weber dengan Etzioni. Definisi Weber nampaknya lebih netral, sedangkan Etzioni memperlihatkan hubungan yang agak negatif dan kurang diinginkan, karena mereka yang dikuasai merasa kehilangan kebebasan.

Menurut Etzioni, asset/milik/modal yang ada pada seseorang (misal uang, benda berharga, kekuatan fisik, dan pengetahuan) dapat dipergunakan oleh pemiliknya

untuk menunjang kekuasaan. Asset sering juga disebut kekuasaan potensial atau sumber kekuasaan. Hal ini untuk membedakan dengan kekuasaan aktif yaitu kekuasaan yang sudah dituang dalam bentuk tindakan.

Asset bersifat kurang lebih stabil, sedangkan kekuasaan bersifat dinamik atau prosesusual. Gejala kekuasaan adalah menterjemahkan asset-asset ini ke dalam kekuasaan. Menterjemahkan asset-asset ini ke dalam kekuasaan akan menghasilkan pelbagai sanksi, imbalan, dan alat-alat (instrumen) untuk menghukum mereka yang menghalangi dan memberikan fasilitas kepada mereka yang mengikuti kemauannya. Sanksi, imbalan dan alat-alat ini dapat bersifat fisik, materiil atau simbolik.

### Negara dan Kekuasaan

Pandangan Weberian yang menganggap negara sebagai arena netral bagi kelompok-kelompok masyarakat (*society-centered*) telah berkembang menjadi negara dianggap sebagai aktor (*state-centered*). Pandangan *state-centered* atau *institutionalism approach* ini dikembangkan oleh Theda Skocpol, Richard Robison, dkk. Perbedaannya dengan Marxian terletak pada cara melihat masyarakat. Weberian (*casuquo state-centered*) melihat masyarakat secara horisontal, sedangkan Marxian melihat masyarakat secara vertikal atau klas.

Theda Skocpol memperbaiki argumen-argumen tentang teori negara terdahulu berkaitan dengan

otonomi negara dari kekuasaan klas. Kehalusan interpretasi strukturalnya terlihat pada cara bagaimana mengkaitkan negara dengan sistem dunia yang berstruktur, di satu sisi, dan struktur sosio-ekonomi klas, di sisi lainnya. Teorinya berupaya menjelaskan fenomena revolusi sosial dengan mengacu pada revolusi klasik di Perancis abad ke-18 dan Rusia serta Cina di abad ke-20. Revolusi tidak dapat dijelaskan tanpa terlebih dulu menjelaskan perubahan struktur negara dalam kaitannya dengan peristiwa dunia dan tekanan-tekanan klas dari bawah di masyarakat (Lemert, 1993: 432).

Theda Skocpol menyatakan bahwa transformasi revolusi-sosial hanya dapat diartikan jika kita menganggap negara sebagai struktur-makro. Negara tidak hanya dipahami sebagai arena tempat dilakukannya perjuangan sosio-ekonomi. Sebaliknya, negara merupakan serangkaian organisasi administratif, pembuat kebijakan, dan merupakan organisasi militer yang dipimpin atau dikoordinir oleh pemerintah selaku otoritas eksekutif (Skocpol, 1993: 433). Negara manapun pertama-tama memperoleh sumber daya dari masyarakat dan mempergunakan sumber daya ini untuk menciptakan dan mendukung organisasi koersif dan organisasi administratif. Tentu saja organisasi negara ini harus dibangun dan harus beroperasi dalam konteks hubungan sosio-ekonomi klas, serta dalam konteks dinamika perekonomian nasional dan internasional. Selain itu,

organisasi koersif dan administratif hanya merupakan bagian dari keseluruhan sistem politik. Sistem-sistem ini juga berisi banyak lembaga tempat kepentingan sosial direpresentasikan dalam pembuatan kebijakan negara serta berisi lembaga-lembaga tempat pelaku nonnegara dimobilisir untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan (Skocpol, 1998: 49). Meski demikian, organisasi koersif dan administratif adalah dasar kekuasaan negara.

Organisasi negara ini secara potensial mempunyai otonomi dari kontrol langsung klas dominan. Sejauh mana otonomi mereka yang sebenarnya dan sampai di mana variasi dari kasus ke kasus. Perlu ditekankan bahwa tingkat aktual dan konsekuensi otonomi negara hanya dapat dianalisis dan dijelaskan dalam artian tipe sistem sosiopolitik dan keadaan internasional historis (Skocpol, 1993: 433). Garis konflik antara klas dominan tuan-tanah dan penguasa negara di negara agraris demikian (seperti Perancis pre-revolusi, Rusia, dan China) menjadi perhatian Skocpol. Dapat dicatat bahwa negara-negara secara potensial mempunyai otonomi dan meneliti kepentingan-kepentingan apa yang mungkin mereka usahakan. Organisasi negara perlu bersaing dengan klas dominan dalam memperebutkan sumber daya dari perekonomian dan masyarakat (Robison, 1982: 131). Dan sumber daya itu dipergunakan secara bervariasi untuk kepentingan klas-klas dominan yang ada. Sumber daya dipergunakan untuk

memperkuat volume dan otonomi negara itu sendiri, sesuatu yang mengancam klas dominan kecuali jika kekuasaan negara yang lebih besar diperlukan dan digunakan untuk mendukung kepentingan klas dominan. Tetapi penggunaan kekuasaan negara untuk mendukung kepentingan klas dominan sebenarnya dapat dihindarkan (Skocpol, 1993: 433). Memang, upaya para penguasa negara untuk menjalankan fungsi negara sendiri mungkin akan menyebabkan konflik kepentingan dengan klas dominan. Negara normalnya menjalankan dua tugas penting: negara menjaga ketertiban dan bersaing dengan negara aktual atau potensial lainnya (Skocpol, 1993: 434). Seperti dikemukakan penganut Marxian, negara biasanya menjalankan fungsi untuk melestarikan struktur ekonomi dan struktur klas yang ada, karena dengan menjalankan fungsi inilah negara dengan mudah mampu menegakkan tatanan. Meski demikian, negara mempunyai kepentingannya sendiri *vis-a-vis* klas subordinat (bawah). Meskipun baik negara maupun klas dominan sama-sama mempunyai kepentingan luas dalam menjaga klas-klas subordinat di masyarakat dan bekerja dalam perekonomian yang ada, kepentingan fundamental negara dalam memelihara tatanan fisik dan perdamaian politik dapat menyebabkan negara, khususnya dalam masa krisis, memberikan konsesi pada tuntutan klas subordinat. Konsesi ini mungkin mengorbankan klas dominan, tetapi

tidak berlawanan dengan kepentingan negara sendiri dalam mengendalikan penduduk dan menarik pajak dan rekrutmen militer.

### Kekerasan

Mahatma Gandhi memperkenalkan tiga jenis perjuangan tanpa kekerasan. Yang paling penting adalah *non-violence of the strong*, yang dilakukan dengan keyakinan akan kekuatan diri. Kemudian *non-violence of the weak*, yang dilakukan karena tidak ada senjata dan sumber daya lain yang diperlukan untuk melakukan pertempuran. Yang terakhir adalah *non-violence of the coward*, yang begitu saja menyerah karena lemah dan takut. Gandhi menganjurkan agar manusia yang berperang memberi makna positif pada peperangan yang mereka lakukan, yaitu berperang untuk memperjuangkan sesuatu, bukan hanya menentang sesuatu (Windhu, 1992: xxii).

Gandhi juga berpendapat bahwa kekerasan bisa dihapuskan kalau kita tahu penyebabnya. Penyebab kekerasan terletak pada struktur yang salah, bukan pada aktor jahat di pihak lain. *Non-violence* adalah non-kooperasi dengan struktur yang salah, sementara pada saat yang sama mengusulkan dan mengerjakan struktur alternatif, kalau mungkin, bukan menentang aktor di pihak lain itu (Windhu, 1992: xxiii).

Kekerasan struktural yang menjadi dasar bagi teori Johan Galtung mengenai perdamaian

positif juga sangat Gandhian. Galtung mencoba menggabungkan analisis yang berorientasi aktor dengan analisis yang berorientasi struktur (Windhu, 1992: xxii-xxiii). Antara aktor dan struktur harus ada interaksi yang seimbang (Windhu, 1992: 29). Menurut Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya (Windhu, 1992: 64). Kekerasan di sini didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual. Di satu pihak manusia mempunyai potensi yang masih ada di "dalam", dan di lain pihak, potensi menuntut untuk diaktualkan yaitu dengan merealisasikan dan memperkembangkan diri dan dunianya dengan nilai-nilai yang dipegangnya. Pengertian "actus" di sini mencakup kegiatan, aktivitas yang tidak tampak (seperti berfikir, bermenung, serta kegiatan mental atau psikologis lainnya) serta kegiatan, tindakan, aktivitas yang dapat diamati/tampak. Inilah kiranya yang menjadi titik tolak dalam memahami kekerasan sebagai penyebab perbedaan antara yang aktual dan yang *potensia*. Pengandaian dasarnya ialah apa yang bisa atau mungkin diaktualisasikan, harus direalisasikan (Windhu, 1992: 66). Walaupun pada kenyataannya tidak semua *potensia* kemudian berkembang menjadi *actus*. Pemahaman Galtung tentang kekerasan lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya pada manusia. Galtung tidak membeda-

kan *violent acts* (tindakan-tindakan yang keras, keras sebagai sifat) dengan *acts of violence* (tindakan-tindakan kekerasan) (Windhu, 1992: 65).

Galtung juga menguraikan enam dimensi penting dari kekerasan yaitu:

1. Kekerasan fisis dan psikologis. Dalam kekerasan fisis tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan sampai pada pembunuhan. Sedangkan kekerasan psikologis adalah tekanan yang dimaksudkan meredusir kemampuan mental atau otak.
2. Pengaruh positif dan negatif. Sistem orientasi imbalan (*reward oriented*) yang sebenarnya terdapat "pengendalian", tidak bebas, kurang terbuka, cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan dan *euphoria*.
3. Ada objek atau tidak. Dalam tindakan tertentu tetap ada ancaman kekerasan fisis dan psikologis, meskipun tidak memakan korban tetapi membatasi tindakan manusia.
4. Ada subjek atau tidak. Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya, dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung. Kekerasan tidak langsung sudah menjadi bagian struktur itu (strukturnya jelek) dan menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama.
5. Disengaja atau tidak. Bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang hanya

menekankan unsur sengaja tentu tidak cukup untuk melihat, mengatasi kekerasan struktural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja. Dari sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap kekerasan.

6. Yang tampak dan tersembunyi. Kekerasan yang tampak, nyata (*manifest*), baik yang personal maupun struktural, dapat dilihat meski secara tidak langsung. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (*latent*), tetapi bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah. Kekerasan tersembunyi yang struktural terjadi jika suatu struktur egaliter dapat dengan mudah diubah menjadi feodal, atau revolusi hasil dukungan militer yang hirarkis dapat berubah lagi menjadi struktur hirarkis setelah tantangan utama terlewati (Windhu, 1992: 68-72).

Galtung juga membedakan kekerasan personal dan struktural. Sifat kekerasan personal adalah dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan. Sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Dalam masyarakat statis, kekerasan personal akan diperhatikan, sementara kekerasan struktural dianggap wajar. Namun dalam

suatu masyarakat yang dinamis, kekerasan personal bisa dilihat sebagai hal yang berbahaya dan salah, sementara kekerasan struktural semakin nyata menampilkannya diri (Windhu, 1992: 73).

Kekerasan personal bertitik berat pada "realisasi jasmani aktual". Ada tiga pendekatan untuk melihat kekerasan personal yaitu cara-cara yang digunakan (menggunakan badan manusia atau senjata), bentuk organisasi (individu, massa atau pasukan), dan sasaran (manusia). Kekerasan personal dapat dibedakan dari susunan anatomis (secara struktural) dan secara fungsional (fisiologis). Perbedaan antara yang anatomis dan fisiologis terletak pada kenyataan bahwa yang pertama sebagai usaha menghancurkan mesin manusia sendiri (badan), yang kedua untuk mencegah supaya mesin itu tidak berfungsi (Windhu, 1992: 74).

Mekanisme kekerasan struktural dalam bentuk enam faktor yang mendukung pembagian tidak egaliter meliputi urutan kedudukan linear, pola interaksi yang tidak siklis, korelasi antara kedudukan dan sentralitas, persesuaian antar sistem, keselarasan antar kedudukan, dan perangkapan yang tinggi antar tingkat. Sistem sosial akan cenderung mengembangkan keenam mekanisme ini yang pada akhirnya memperbesar ketidak-samaan. Dalam beberapa struktur ketidak-samaan terjadi begitu rupa sehingga pelaku yang berkedudukan paling rendah tidak hanya relatif terhalangi dimensi potensial-

nya, tetapi juga sungguh-sungguh berada di bawah batas minimum subsistensinya. Struktur tidak memungkinkan mereka membangun kekuatan, mengorganisir dan mewujudkan kekuasaannya berhadapan dengan "pihak yang kuat". Mereka terpecah belah, kurang integrasi dan kurang mempunyai kekuasaan atas diri sendiri, otonomi yang cukup untuk menghadapi pihak yang kuat. Jadi kekerasan personal maupun struktural membahayakan jasmani, tetapi kekerasan struktural lebih sering dilihat sebagai kekerasan psikologis. Perbedaannya hanya dalam cara tetapi akibatnya memperlihatkan hasil yang serupa (Windhu, 1992: 75).

Perbedaan kekerasan personal dan kekerasan struktural tidak tajam. Keduanya bisa mempunyai hubungan kausal dan mungkin pula hubungan dialektis. Perbedaan antara kekerasan personal dan kekerasan struktural berarti melalaikan unsur struktural dalam kekerasan personal dan unsur personal dalam kekerasan struktural.

Walaupun kekerasan sudah menjadi satu dengan struktur, namun ada saja orang yang tampaknya menjadi beringas dalam hampir semua kejadian. Ini berarti mereka menampakkan kecenderungan kerasnya di luar konteks struktural yang masih bisa diterima masyarakat luas (Windhu, 1992: 76).

Menurut Galtung satu jenis kekerasan tidak mengandaikan kehadiran nyata jenis kekerasan

lainnya. Namun, juga diakui bahwa kemungkinan kekerasan struktural nyata mengandaikan kekerasan personal tersembunyi. Misalnya, jika struktur terancam, mereka yang mendapat keuntungan dari kekerasan struktural, terutama mereka yang berada pada posisi puncak akan berusaha mempertahankan *status quo* untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. Mereka ini bisa saja tidak tampil terang-terangan untuk membela struktur, tetapi dengan menggunakan "alat" (polisi, tentara bayaran) untuk memerangi sumber-sumber kekacauan, sementara mereka sendiri tetap tinggal jauh terasing dan terencil dari pergolakan kekerasan personal (Windhu, 1992: 77).

### **Kekuasaan dan Kekerasan**

Kajian tentang kekuasaan dan kekerasan dimulai oleh Thomas Hobbes (1651) dalam bukunya yang berjudul *Leviathan*. *Leviathan* adalah hewan laut yang besar, menakutkan dan berkuasa atas makhluk lain dengan menggunakan kekerasan. Menurut Hobbes manusia bertindak atas dasar kepentingan diri dan menjadi fitrah manusia untuk berselisih dan bertengkar. Manusia juga punya keinginan untuk hidup damai, oleh karena itu perselisihan dan pertengkar harus diselesaikan lewat kekuasaan. Penguasa memiliki kekuasaan tak terbatas termasuk menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan tersebut. *Homo homini lupus*,

manusia menjadi serigala bagi yang lain dan akibatnya *belum omnium contra omnes*, perang semua lawan semua (Gordon, 1991: 70-6).

Beberapa pemikir, seperti John Locke (1690), Montesquieu (1748) dan Rousseau (1762), melancarkan kritik terhadap Hobbes. Menurut Locke kekuasaan bersifat terbatas, sehingga tidak seorang pun dibenarkan melakukan kekerasan untuk merusak orang lain dalam soal hidup-mati, kesehatan, kemerdekaan ataupun miliknya (Gordon, 1991: 76-82). Montesquieu memperkenalkan Trias Politika untuk menghindari despotisme atau kekuasaan yang sewenang-wenang termasuk penggunaan kekerasan (Gordon, 1991: 82-7). Rousseau menolak anggapan Hobbes yang menyatakan kekerasan ada sejak semula dalam diri manusia. Menurut Rousseau, kemajuan dalam bentuk peradabanlah yang membuat manusia melaksanakan kekerasan (Gordon, 1991: 89).

Kekuasaan, sebagaimana dikemukakan Weber dalam uraian di muka, merupakan kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan, baik dalam bentuk pengurangan pemberian ganjaran secara teratur mau pun dalam bentuk penghukuman sejauh kedua hal itu ada, dengan memperlakukan sanksi negatif. Lord Acton melihat bahwa kekuasaan cenderung busuk dan menjadi kekuasaan mutlak (Windhu, 1992: 32).

Kekuasaan merupakan konsep yang paling dasar dan kaya

dalam ilmu politik. Hubungan kekuasaan merupakan hubungan yang eksploitatif dan represif. Kekuasaan menjadi nyata dalam hubungan sosial yang tidak seimbang (Windhu, 1992: 33).

Kekerasan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan acapkali dilakukan melalui kegiatan intelijen militer. Biasanya pemegang kekuasaan sengaja memancing terjadinya kekerasan di masyarakat agar pemegang kekuasaan memiliki alasan kuat untuk memberlakukan keadaan darurat (Heryanto, 1993: 29-40). Kekerasan seperti ini bisa juga dengan menggunakan aparat penegakan hukum terhadap para demonstran, misalnya menggunakan pentungan kayu atau disemprot dengan cairan tertentu dari mobil tangki air. Kekerasan bisa juga berwujud kekerasan hukum melalui hukuman atau pidana mati.

Studi tentang kekuasaan dan kekerasan telah banyak dilakukan di pelbagai negara. Ross membahas tindakan pemerintah selaku penyelenggara kekuasaan di Amerika Serikat yang dilakukan dengan hati-hati untuk menutupi upaya kekerasan mereka dalam kerangka mengatasi keadaan tidak stabil ataupun mengancam kejatuhan penguasa (Ross, 1977: 152-5). Jacobs and O'Brien secara tegas menyatakan keterlibatan polisi secara struktural dalam pelbagai tindak kekerasan terhadap ras tertentu, menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat dan memancing kerusuhan di

masyarakat (Jacobs & O'Brien, 1998: 837-45). Kekerasan oleh pemegang kekuasaan secara lebih kasat mata terlihat di banyak negara berkembang seperti Guatemala dan Indonesia. Studi Hale memaparkan keterlibatan militer dalam kekerasan di Guatemala sejak tahun 1961-1966 (Hale, 1997: 817-37). Heryanto juga memerikan terorisme negara pada masa Orde Baru di Indonesia (Heryanto, 1993: 29-40).

Menurut Snider, tujuan akhir dari kekerasan yang dilakukan negara adalah kekuasaan politik (Snider, 1994: 3-7). Kekerasan negara yang dilakukan di negara-negara Amerika Latin, Afrika dan Asia cenderung kasat mata, sedangkan di Eropah dan Amerika lebih tersembunyi. Akibat kekerasan negara menurut Hewitt ialah hancurnya properti, hilangnya kepercayaan serta nyawa manusia, berubahnya struktur ekonomi, sosial dan politik, dan yang paling menyedihkan berubahnya opini masyarakat tentang substansi suatu masalah yang berdampak sampai beberapa generasi (Hewitt, 1996: 201-2). Kekerasan negara yang terjadi di Afrika mengakibatkan turunnya produktivitas ekonomi dan tumbuhnya rasa takut pada investor baru (Short, 1998: 906-7).

### **Negara dan Kekerasan**

Apabila negara dianggap sebagai kekuatan reaksioner yang bertujuan memulihkan tatanan tradisional, atau gerakan progresif kepentingan rakyat menentang kekaisaran,

dinasti, dan *privilege*, maka tidak ada kekuatan yang mampu mencegah negara untuk menggunakan kekerasan atau terlibat dalam tindak kekerasan (Steger & Lind, 1999: xxi). Semua tipe atau kategori negara pasti mempunyai kecenderungan untuk mengabsahkan penggunaan kekerasan terhadap pihak lain yang dipersepsi sebagai orang-orang yang mengancam eksistensi negara. Negara dihubungkan dengan kekerasan dalam banyak hal. Pertama, negara membangkitkan dikotomi konseptual dan psikologis yang cenderung mendorong tindak kekerasan politik. Kedua, negara dilibatkan dalam perjuangan memperebutkan otonomi politik yang dipahami sebagai kontrol atas instrumen koersif dan regulasi wilayah. Bentuk ketiga kekerasan negara berhubungan dengan peran penting peperangan dalam perkembangan historis negara.

Bila kita perhatikan hasil-hasil studi empiris, dan tidak sekedar puas dengan asumsi-asumsi belaka, akan terlihat dengan jelas bahwa konsep negara sebagai suatu kerangka netral ternyata lebih merupakan persangkaan daripada kenyataan. Dari sejarah kita bisa mengetahui bahwa negara sesungguhnya bukan kerangka yang netral, sebab ia memantapkan suatu sistem penilaian, tegasnya memilih suatu atau tujuan tertentu.

Ketika negara dikepalai oleh seorang raja, pemihakan negara pada raja, ditandai dengan mendudukannya sebagai utusan Tuhan di dunia. Akibatnya lahir

pandangan: "raja tidak dapat berbuat salah" (*King can do no wrong*).

Tahun 1776 bangsa Amerika merdeka. Cita-cita dituangkan dalam *Declaration of Independence* isinya antara lain menyatakan: hak mutlak untuk hidup, kemerdekaan dan usaha mencapai kebahagiaan, serta disebutkan bahwa manusia diciptakan sama. Tetapi pada saat itu juga, bangsa Negro mendapat perlakuan tidak sama. Mereka dikejar-kejar, ditangkapi dari Afrika dibawa ke Amerika dan sebagai budak untuk dipekerjakan di ladang-ladang pertanian.

Ketika itu negara memihak ras kulit putih dan menindas ras kulit hitam. Baru pada tahun 1865 Abraham Lincoln menghapuskan perbudakan. Dan jangan lupa bahwa hal itu harus dicapai melalui perang saudara selama lima tahun.

Tahun 1789 Revolusi Perancis pecah. Slogan *liberte-egalite-fraternite* dikumandangkan oleh kaum borjuis untuk merebut simpati lapisan bawah, guna melawan absolutisme kekuasaan raja. Dan ketika kaum borjuis berhasil merebut kekuasaan, mayoritas lapisan bawah baru sadar bahwa dalam keadaan tidak sama atau timpang, slogan tersebut lebih menguntungkan kaum borjuis, dan sebaliknya merupakan bumerang bagi lapisan bawah.

Dengan slogan kemerdekaan tidak otomatis kaum buruh memperoleh hak kebebasan berserikat, sebab berbenturan dengan hak kaum borjuis untuk bebas berusaha dan berniaga.

Slogan persamaan tidak berarti kaum buruh bisa menuntut upah yang layak untuk hidup secara wajar, sebab berbenturan dengan kepentingan kaum borjuis untuk mencari untung sebesar-besarnya guna meluaskan dan mempertahankan eksistensi usahanya. Dan permulaan abad ke 19 sejarahnya mencatat di kota-kota besar di Inggris dan Perancis terdapat jutaan kaum buruh dalam keadaan sangat menyedihkan. Mereka bekerja 16 jam per hari.

Dalam negara demokrasi baik di Amerika dan Perancis di mana kemerdekaan, kebebasan, persamaan, wibawa hukum dihormati dan dijunjung tinggi dalam konstitusi, ternyata penindasan terlindung cukup aman dan terhormat. Demokrasi yang ganjil ini oleh Soekarno disebut sebagai demokrasi yang anti sosial sebab tidak menyelamatkan, menyejahterakan dan melindungi segenap rakyat. "Asal-usul negara adalah penaklukan" dan "asal-usul negara adalah kontrak sosial" bukan dua penjelasan yang bersaing. Yang satu membicarakan asal-usul negara di masa yang sebenarnya, sedangkan yang lain membahas deduksi logis. Keduanya secara simultan bisa valid. Penyelidikan historis mungkin memperlihatkan bahwa kebanyakan negara melacak asal-usulnya pada kekalahan satu bangsa oleh bangsa lainnya, jarang sekali pada kekuasaan pemimpin yang menang dan pasukan perangnya atas bangsanya sendiri, dan seringkali pada migrasi. Pada waktu yang sama, aksioma yang diterima luas

juga akan membantu memperlihatkan bahwa orang rasional, dalam mengejar kepentingannya, menganggap dirinya diuntungkan bila tunduk pada seorang raja, yaitu negara. Karena kedua jenis penjelasan tentang negara ini menguraikan kategori yang tidak berkaitan, tidak ada gunanya bila berusaha mengkaitkannya atau memberi prioritas pada yang satu daripada yang lain. Juga tidak masuk akal bila mengambil kesimpulan bahwa karena negara telah terbentuk dan pertumbuhannya pesat, sudah pasti rasional jika orang yang mengejar kepentingannya tunduk pada negara —jika tidak, mereka akan mengadakan peperangan sebelum hal itu terjadi (de Jasay, 1985: 15).

#### **Negara, Kekerasan dan Sistem Politik**

Negara dan sistem politik yang dianut merupakan aspek yang berhubungan erat dengan aktivitas dan kedudukannya dalam penggunaan kekerasan. Pandangan *state-centered* bahwa negara adalah aktor yang turut bermain dalam arena, termasuk menentukan sistem politik yang dianut dan upaya untuk memonopoli dan melegitimasi penggunaan kekuatan fisik (Held, 1999: 111). Dengan demikian, kekuasaan, yang bisa dianggap sebagai kemampuan untuk menggunakan kekuasaan secara efektif, dan sistem politik, yang bisa dianggap sebagai sarana untuk melaksanakan kekuasaan, merupakan dasar utama eksistensi

suatu negara. Jadi kekuasaan, klaim monopolistik terhadap kekuatan fisik, dan sistem politik sangat mendasar bagi eksistensi negara. Negara yang tidak mampu menegakkan klaim monopolistiknya berada di ambang disintegrasi dan menghadapi ancaman perang saudara dan pembubaran (Held, 1990: 413). Contohnya dapat diambil mulai dari runtuhnya Kekaisaran Romawi hingga pemberontakan Pakistan Timur dan pemisahannya untuk membentuk negara baru Banglades.

Persoalan kekerasan di Negara Komunis Eropa Timur dan Uni Soviet, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bialer sangat mengemuka dalam sistem politik yang dibentuk melalui penaklukan revolusioner. Hal yang sama, di Uni Soviet, rejim timbul dari revolusi yang dituntun oleh minoritas kecil. Rejim tersebut berkembang menjadi kediktatoran penuh yang selama lebih dari satu dekade memerangi revolusi sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat dari atas. Rejim ini menggunakan teror sebagai instrumen penanganan kemasyarakatan sehari-hari hingga 25 tahun yang lalu. Barangkali karena ini Uni Soviet sangat sukses dalam melegitimasi dirinya. Faktor-faktor yang membantu dalam proses ini adalah otentisitas nasional Revolusi Bolshevik, kekuasaan normatif yang digunakan oleh periode kepemimpinan partai Komunis, dan rapuhnya beberapa krisis politik utama, termasuk invasi Nazi 1941 dan beberapa periode suksesi kepemimpinan

(tidak adanya krisis yang dramatis selama suksesi Andropov lebih lanjut menambah argumen bagi legitimasi rejim Soviet). Bialer selanjutnya membahas persoalan yang berhubungan dengan prinsip legitimasi yang relevan paling penting, dan persoalan apakah cara integrasi cara yang menyokong legitimasi tuntutan pemegang kekuasaan dalam elit tersebut dan dalam berbagai institusi masyarakat Soviet (Held, 1990: 418-429).

George Sorel meneliti hubungan antara sosialisme dan kekerasan proletar. Dengan menolak sifat deterministik Marxian, ia justru mengedepankan pentingnya "mitos" yang mampu mengilhami klas pekerja untuk beraksi. Sorel meneliti kekuatan pemobilisasi kekerasan dalam "mitos pemogokan umum," yang memungkinkan klas pekerja revolusioner untuk menantang aturan borjuis. Sorel mengusulkan dikembangkannya etika *proletarian grandeur* (kemuliaan proletar) yang akan berkontribusi pada terbentuknya "sosialisme baru." Refleksi Sorel tentang kekerasan tidak saja mempengaruhi generasi pemikir sosialis tetapi juga terbukti sangat berpengaruh dalam perkembangan ideologi fasis (Steger & Lind, 1999: 253-264).

Manfred B. Steger menghubungkan ambruknya Marxisme-Leninisme 1989-1991 di Eropa Timur dengan dua cacat teoritis serius dalam Marxisme. Pertama, dia berpendapat bahwa sistem sosialis kurang mempunyai wawasan tentang hubungan antara kekuasaan dan kekerasan. Masalah

utamanya terletak pada konsepsi satu dimensi kekuasaan Marxisme sebagai mekanisme pemaksaan yang tak dapat dibenarkan, yang diterapkan oleh banyak sistem politik sesuai aturan instrumental yang ketat. Seperti dikatakan Hannah Arendt, Marxisme memperlihatkan kecenderungan untuk mempersamakan kekuasaan dengan "organisasi penyelenggaraan kekerasan" dan "keefektifan tuntutan." Pandangan semacam ini menghapuskan peran konstruktif kekuasaan dan ideologi yang dipahami sebagai negosiasi, kompromi, dan yang terpenting, sebagai strategi "nonkekerasan" perlawanan individu dan kolektif. Kedua, Steger mengamati bahwa teleologi deterministik Marxisme mengabaikan dan meremehkan persoalan krusial etika, kebebasan individu, dan moralitas politik. Meski berkesimpulan bahwa Marxisme tidak menyediakan sarana yang cukup bagi proyek perluasan persamaan/kesejajaran sosial, Steger menekankan bahwa persoalan sentral sosialisme tetap penting untuk abad ke-21 mendatang: "Bagaimana kita mampu merekonsiliasi perdamaian, kebebasan, sosialisme, non-kekerasan, dan demokrasi, sementara pada saat yang sama kita juga memelihara derajat tertinggi kebebasan individu dan persamaan ekonomi?" (Steger & Lind, 1999: 284-289).

Pendekatan Offe dan Habermas, yang memiliki banyak ciri yang sama, menyoroti arti penting proses legitimasi di masyarakat kapitalis

maju dan menempatkan persoalan legitimasi di pusat konflik dan kontradiksi dalam kapitalisme maju. Bialer dan Saul cenderung memperlakukan perolehan dan pemilikan kekuasaan negara sebagai faktor sentral, Offe dan Habermas memandang sifat problematik proses legitimasi sebagai faktor krusial dalam kapasitas sistem kapitalis untuk bertahan dari kontradiksinya sekarang. Menurut pandangan Offe, negara dipaksa intervensi dalam ekonomi untuk menangani krisis ekonomi dan menyokong kepentingan mereka yang terlibat dalam melaksanakan kekuasaan negara dalam konteks kapitalisme baru-baru ini. Namun ini bertentangan dengan perhatian kapitalis pada kebebasan ekonomi dan menentang etika swasta dan kapitalisme yang memberikan legitimasi bagi tatanan sosial keseluruhan. Dengan tugas yang berkontradiksi ini, Offe memandang kelangsungan hidup negara kapitalis sangat problematik (Held, 1990: 487-91).

Pendekatan Habermas, yang juga dibahas oleh Held, adalah sama dan gagasan krisis legitimasi juga utama bagi pandangannya tentang konflik yang menantang negara kapitalis saat ini. Namun Habermas menunjukkan arti penting dimensi politik negara kapitalis akan kebutuhannya untuk mempertahankan tingkat loyalitas massa tertentu. Kontradiksi di sini adalah kontradiksi kelas: negara kapitalis maju bertindak pada kepentingan modal sambil menuntut legitimasi dari rakyat.

Kontradiksi tersebut menjadi kritis tidak hanya karena defisit legitimasi, tetapi juga karena defisit motivasi (Held, 1990: 491-6). Meskipun tidak mudah membedakan krisis motivasi dari krisis legitimasi yang diperkenalkan di muka, nampak jelas: negara kapitalis dihadapkan pada kontradiksi yang tak terpecahkan dan tidak mampu melegitimasi dirinya sendiri atau memperoleh dukungan yang cukup untuk menopang aktivitasnya. Pandangan kontroversial tentang negara di masyarakat kapitalis ini dengan demikian menarik hubungan lebih lanjut antara kemampuan negara untuk melegitimasi dirinya sendiri dan kemampuannya untuk mempertahankan monopoli kekuasaan dalam wilayah hukum tertentu.

Dari uraian di muka dapat disimpulkan keterkaitan negara, kekerasan dan sistem politik sebagai berikut :

Negara	Sistem Politik	Bentuk Kekerasan
Europa Timur dan Soviet sebelum tahun 1990	Komunis	Kekerasan negara (fisik dan simbolik)
Europa Timur dan Soviet setelah tahun 1990	Sosialis Demokrat	Kekerasan negara dan kekerasan proletar
Pasca Kolonial (Tanzania)	Otokrasi Tradisional	Kekerasan primordial
Britania Raya, Amerika Serikat	Demokrasi	Kekerasan struktural kapitalisme

Sedangkan hubungan antara sistem politik dengan sumber-sum-

ber kekuasaan negara dapat digambarkan sebagai berikut:

Sistem Politik	Sumber Kekuasaan Negara	
	Per-suasif	Ko-ersif
Demokrasi	++	
Otokrasi Tradisional		++
Sosialis Demokrat		++
Komunis		++

Terlepas dari pelbagai kekurangan yang ada, nampaknya sistem politik demokrasi memiliki sumber kekuasaan negara yang cenderung persuasif. Namun tidak berarti sistem politik demokrasi bebas dari kekerasan, karena di dalam sistem politik demokrasi juga melekat kekerasan struktural kapitalisme. Kekerasan memang gejala yang serba hadir.

#### Daftar Pustaka

- de Jasay, Anthony, *The State* (Oxford: Basil Blackwell, 1985).
- Hale, Charles R., "Consciousness, Violence, and The Politics of Memory in Guatemala", dalam *Current Anthropology*, Volume 38, Number 5, 1997.
- Held, David *et.al.* (Eds), *States and Societies* (Oxford: Basil Blackwell, 1990).
- Jacobs, David and O'Brien, Robert M., "The Determinants of Deadly Force: A Structural Analysis of Police Violence", dalam *American Journal of Sociology*, Volume 103, Number 4, 1998.
- Mc Lennan, Gregor *et.al.* (Eds), *The*

- Idea of the Modern State* (Philadelphia: Open University Press, 1987).
- Poloma, Margaret M., *Contemporary Sociological Theory* (New York: MacMillan Publishing, Co., 1979).
- Robison, Richard, "Culture, Politics, and Economy in the Political History of the New Order", dalam Benedict Anderson and Audrey Kahin, *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate* (New York: Cornell University, 1982).
- Robison, Richard, "Pengembangan Industri dan Perkembangan Ekonomi-Politik Modal: Kasus Indonesia", dalam Ruth Mc Vey (Ed), *Kaum Kapitalis Asia Tenggara* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).
- Ross, Jeffrey Ian, "Controlling State Crime: An Introduction", dalam *The Journal of Conflict Studies*, Journal of The Centre for Conflit Studies University of New Brunswick, 1997.
- Scott, James C., *Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts* (New Haven and London: Yale University Press, 1990).
- Short, James F., "Poverty, Ethnicity, and Violence Crime", dalam *American Journal Sociology*, Volume 104, Number 3, 1998.
- Skocpol, Theda, "The State as a Janus-faced Structure", dalam Charles Lemert (Ed), *Social Theory. The Multicultural & Classic Readings*, (Boulder-San Francisco-Oxford: Westview Press, 1993).
- Skocpol, Theda, "Revolusi Sosial di Dunia Modern dan Mobilisasi Rakyat Secara Militer", dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Unisia*, No. 37/ XX/ 1/ 1998.
- Snider, Don M., "Post-Cold War Political Violence", dalam *Global Business White Papers*, No. 10, 1994.
- Steger, Manfred B. & Lind, Nancy S., *An Interdisciplinary Reader Violence and its Alternatives* (New York: St. Martin's Press, 1999).
- Windhu, I. Marsana, *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992).
- Zeigler, Harmon, *The Political Community A Comparative Introduction to Political Systems and Society* (New York-London: Longman, 1990).